

Kemitraan Strategis: Kontribusi Industri Manufaktur Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Raihan Maulana Syafiq
Departemen Hubungan Internasional
Universitas Sebelas Maret
Raihanmaulana12@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kontribusi industri manufaktur Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dengan menggunakan pendekatan teori developmental state dan merkantilisme. Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi aktor pembangunan di kawasan Selatan. Industri manufaktur menjadi sektor unggulan yang menyumbang signifikan terhadap PDB dan ekspor nasional, namun belum dilibatkan secara optimal dalam kebijakan KSST. Melalui studi kasus PT INKA, PT Sinar Antjol, dan Indofood, ditemukan bahwa keterlibatan manufaktur dalam kerja sama lebih didorong oleh inisiatif perusahaan, bukan strategi negara. Padahal, sektor ini dapat berperan dalam transfer teknologi, investasi lintas negara, serta penguatan kapasitas negara mitra. Perbandingan dengan Brasil menunjukkan bahwa negara tersebut lebih strategis dalam mengintegrasikan industri ke dalam diplomasi pembangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu merancang kebijakan yang menjadikan sektor manufaktur sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan solidaritas global. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan terkoordinasi, kontribusi manufaktur Indonesia dapat diperluas tidak hanya untuk kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan kolektif di negara-negara Selatan.

Kata Kunci: Industri Manufaktur, Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, Diplomasi Ekonomi, Developmental State, Merkantilisme

Abstract

This study examines the contribution of Indonesia's manufacturing industry to South-South and Triangular Cooperation (SSTC) using developmental state theory and mercantilism as analytical frameworks. As a middle-income country, Indonesia holds strategic potential to act as a development partner among Southern nations. While the manufacturing sector significantly contributes to GDP and national exports, its involvement in SSTC remains limited and unstructured. Case studies of PT INKA, PT Sinar Antjol, and Indofood demonstrate that engagement in SSTC is primarily driven by corporate initiatives rather than coordinated national strategy. These companies show potential in knowledge transfer, cross-border investment, and capacity building in

partner countries. A comparison with Brazil highlights how that country has more systematically integrated its industrial sector into development diplomacy. The findings suggest that Indonesia needs to reposition its manufacturing sector as a strategic instrument of economic diplomacy and global solidarity. With better policy integration and inter-agency coordination, the sector could support both national economic growth and the broader development agenda of Global South cooperation.

Keywords: Manufacturing Industry, South-South and Triangular Cooperation, Economic Diplomacy, Developmental State, Mercantilism

1. Pendahuluan

Selama kurun waktu lebih dari 60 tahun sejak kerja sama pembangunan yang muncul setelah perang dunia II, dimana sistem dunia telah mengalami perubahan yang signifikan. Hegemoni AS yang luar biasa mendominasi ekonomi dunia mulai goyah pada tahun 1970-an, membuka jalan tren multi-polarisasi ekonomi dengan pemulihan di Jepang dan Eropa, ditambah lagi dengan berakhirnya perang dingin, globalisasi semakin cepat pada masa itu. Mengantarkan sistem kerja sama internasional dunia ini pada era perubahan tektonik, ditandai dengan aliran sumber daya dari negara maju (“Utara”) ke negara berkembang (“Selatan”). Sementara negara-negara maju seperti negara-negara Eropa, AS, dan Jepang mengalami kesulitan yang terus meningkat, negara-negara ekonomi berkembang memperkuat kehadiran mereka dengan cepat. Negara yang dikategorikan sebagai “negara berkembang” tidak lagi homogen. Ada sejumlah negara berkembang yang mungkin mencapai banyak Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) mereka, sementara ada beberapa negara berkembang yang bisa dikatakan “rapuh” yang masih jauh tertinggal. Jumlah negara berkembang yang semakin meningkat, khususnya negara-negara yang ekonominya sedang berkembang pesat, mulai bertindak sebagai penyedia kerja sama, sehingga memperluas kemungkinan kerja sama Selatan-Selatan. Dan, dengan semakin banyaknya penyedia bantuan internasional di bidang ini, gagasan tentang kerja sama internasional pun semakin beragam bentuknya (Akio Hosono, 2012).

Untuk menyelesaikan ketidakseimbangan ini, diciptakan kerangka kerjasama internasional baru yang disebut KSST (Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular). KSST menggabungkan KSS (Kerjasama Selatan Selatan) dan Kerjasama Triangular. KSS adalah jenis kerjasama antar dua atau lebih negara berkembang yang melibatkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknis. Sedangkan Kerjasama Triangular adalah jenis kerjasama antara dua atau lebih

negara berkembang dengan pihak ketiga, yaitu negara maju (Abdurachman & Mi'raz Prakoso, 2017). Di samping itu, Indonesia selalu memandang KSS sebagai bentuk solidaritas dan kerja sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian bersama atas dasar solidaritas, kepentingan bersama, dan keuntungan bersama sesama negara berkembang. Indonesia selalu ingin menjadi rekan sejati untuk kemajuan melalui KSS Indonesia untuk negara-negara berkembang. KSS telah menjadi modalitas dan alat strategi yang penting bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan negara berkembang (Hutabarat & Damayanti, 2023).

Sebagian besar, Indonesia memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk tenaga kerja, pelatihan pengembangan kapasitas, dan bantuan alat. Bantuan diberikan kepada negara-negara Asia, Afrika, Pasifik, dan Amerika latin. Indonesia memprioritaskan memberikan bantuan teknis kepada Palestina secara khusus. Indonesia paling banyak memberikan bantuan teknis kepada Palestina secara khusus. Indonesia paling banyak memberikan bantuan kepada Palestina. Dari tahun 2006 hingga 2014, 1.061 warga palestina menerima bantuan kerjasama teknik dari Direktorat Kerjasama Teknik, dan hingga tahun 2016, diperkirakan ada sekitar 1.600 warga Palestina yang menerima bantuan ini (Apresian, 2017). Peran Indonesia dalam KSS telah berubah dari negara penerima menjadi salah satu negara "donor baru yang muncul" yang secara konsisten memberikan hibah dan bantuan kerja sama teknik. Ini terjadi sejak Indonesia menjadi negara dengan tingkat pendapatan menengah. Pada tahun 2019, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), juga disebut Indonesia Agency for International Development (Indonesian AID), didirikan sebagai upaya negara donor untuk melakukan diplomasi (Hutabarat & Damayanti, 2023).

Sektor swasta dianggap sangat penting untuk meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan, termasuk memanfaatkan peluang pasar dan investasi di negara negara berkembang. Dalam hal ini, sektor swasta harus terlibat secara aktif dalam memberi tahu pemerintah tentang peluang pasar di negara-negara berkembang. Kesuksesan B-29 dalam investasi ke wilayah Afrika, seperti Ethiopia, menunjukkan beberapa contoh sektor swasta yang sukses dalam melakukan investasi dan memasuki pasar negara-negara berkembang. Produsen sabun First Indo-Ethio Plc. (PT. Sinar Antjol) melakukan investasi senilai 4 juta dolar dan sekarang menguasai 35% pasar Ethiopia, Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan,

sektor swasta dan lembaga non-pemerintah harus memaksimalkan potensi mereka (JICA, 2010). Salah satunya industri manufaktur. Sektor industri adalah sektor utama yang mendorong perekonomian nasional dibuktikan dengan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 PDB Indonesia dari sektor manufaktur mengalami fluktuatif (Suryani & Yusrizal, 2023) Industri manufaktur adalah salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh Revolusi Industri 4.0. tidak hanya di proses pembuatan, tetapi juga di seluruh rantai nilai industri, menghasilkan model bisnis baru yang berbasis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan produk dengan kualitas yang lebih baik. Pada sisi lain, Revolusi Industri 4.0 menimbulkan kekhawatiran bahwa robot akan menggantikan manusia. Ini akan mengakibatkan penurunan industri kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International Labor Organization/ILO (2016), Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Kamboja akan melihat pengotomatisan 56 persen pekerjaan (Nugroho et al., n.d.).

Berdasarkan data yang ada, penelitian ini disusun dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang sejauh mana peran industri manufaktur Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (SSTC), Menganalisis tentang peran industry manufaktur dalam kerja sama Selatan-Selatan, termasuk alasan mengapa tidak pernah dieksposnya peran industri manufaktor di sistem Kerjasama Selatan-Selatan, mendeskripsikan potensi industri manufaktur Indonesia dalam yang dapat dikembangkan dalam kerangka SSTC.

2. Kerangka Pemikiran

a. Developmental Theory

Teori *Development State* adalah ideology yang memberikan legitimasi utama bagi pelaksanaan negara dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini negara selalu memiliki peran yang menonjol dalam pembangunan dan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses structural yang lebih berfokus kepada permintaan daripada sisi penawaran, meskipun pasar memiliki peran yang utama, intervensi negara diperlukan untuk menyediakan kerangka kelembagaan dan menetapkan strategi pembangunan nasional, pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengandalkan tabungan domestik sebagai sumber pendanaan pembangunan, serta dengan menyeimbangkan utang publik terhadap PDB dan nilai tukar, maka dibutuhkan peran pemerintah dalam pengembangan Industri manufaktur (Syukri, 2024).

Indonesia adalah negara berkembang, Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ekonominya. Pembangunan ekonomi akan terus berkembang selama alurnya tepat dan sesuai tujuannya. Industri manufaktur selalu di prioritaskan dalam rencana pembangunan. Karena sektor ini dapat mendorong sektor lain seperti jasa, pertanian, dan lainnya. Industri manufaktur masih menjadi pendorong utama perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi industri pengolahan nonmigas, yang pada triwulan kedua tahun 2023 mencapai 16,30 persen dari PDB nasional (Bella Fasta'sima, Hafizhah Hasna Zaharani, Wildan Ubaydilah Widodo, & Naerul Edwin Kiky Aprianto, 2024). Hal ini sejalan dengan Ha-Joon Chang menekankan bahwa 'pembangunan ekonomi memerlukan suatu negara yang mampu menciptakan dan mengatur hubungan ekonomi dan politik yang dapat mendukung industrialisasi berkelanjutan – atau singkatnya, negara pembangunan'(ANDRZEJ BOLESTA, 2007). Maka dibutuhkan sebuah regulasi agar industri manufaktur dapat berkontribusi dalam Kerjasama luar negeri Indonesia.

Negara-negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan dalam cara mereka memikirkan kebijakan perdagangan internasional. Keyakinan yang berbeda ini tercermin dalam kebijakan negara berkembang, yang biasanya menerapkan tindakan untuk menghentikan barang dan jasa dari perusahaan asing, terutama dari negara maju. Negara maju mendorong keterbukaan tanpa hambatan dari negara lain, termasuk negara berkembang, negara berkembang melakukan ini bukan tanpa alasan, seperti perlindungan lapangan pekerjaan, pengembangan UMKM, pendapatan devisa. Disisi lain negara maju keterbukaan didorong tanpa adanya hambatan dari negara lain, hal ini dimaknai sebagai perdagangan yang tidak mendiskrimansi terhadap darimana asal barang itu. Keinginan pelaku usaha dari negara maju untuk menjual barang tanpa hambatan menunjukkan pentingnya pasar. Orang-orang di negara berkembang memiliki prioritas yang berbeda, seperti menjaga industri dalam negeri yang masih berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan keamanan pangan. Negara maju, di sisi lain, lebih cenderung mengejar kepentingan ekonomi dan bisnis mereka di pasar global, sering mendukung liberalisasi perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memperluas akses pasar ekspor mereka. Negara maju cenderung mengutamakan deregulasi dan keterlibatan ekonomi yang lebih terbatas dari pemerintah. Mereka mendukung gagasan pasar bebas dan berusaha mengurangi hambatan perdagangan. Sebaliknya, negara berkembang sering

memiliki pemerintah yang lebih terlibat dalam ekonomi, mereka mengutamakan perlindungan pada sektor strategis dan mendorong perkembangan industri domestik. Mereka dapat mengadaptasi instrument kebijakan layaknya tarif, kuota, subsidi (Permata Sari & Ibrahim, 2023). Ternyata keterlibatan politik dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional sangat signifikan, ideologi politik, tekanan internasional, kepentingan kelompok dan tata Kelola pemerintahan sangat mempengaruhi kebijakan tersebut.

b. Mercantilism

Merkantilisme adalah doktrin ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan negara yang dipimpin oleh pemerintah, yang juga dapat disebut sebagai sistem atau kebijakan ekonomi. Antara tahun 1600 dan 1800, negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Portugal, Belanda, dan Jerman menggunakan komunisme. Merkantilisme berpendapat bahwa jumlah logam mulia suatu negara menentukan kemajuannya. Perak dan emas adalah logam mulia yang dimaksud. Logam berharga ini dapat diperoleh melalui perdagangan dengan negara lain. Namun, dalam praktik merkantilisme, impor harus dibandingkan dengan ekspor. Alasannya adalah bahwa suatu negara akan mengalami keuntungan dalam perdagangan internasional jika nilai ekspor lebih besar daripada impor Kerajaan disebut sebagai "*Mother Country*", atau negara induk, dalam sistem merkantilisme. Semua perdagangan di koloni atau wilayah mereka akan diawasi oleh negara induk ini. Koloni tidak boleh berdagang dengan kerajaan atau koloni lain dalam hal ini (Seruni, 2024). Dari bacaan diatas bisa disimpulkan sistem ekonomi ini tujuannya memperkaya suatu negara dengan mengumpulkan uang dan memonopoli perdagangan luar negeri.

Dengan asumsi bahwa kekayaan dunia berfluktuasi, tumpukan logam mulia merupakan ukuran kekayaan negara. Dengan demikian, pemerintah harus mendorong ekspor logam mulia, sehingga negara yang memiliki stok logam mulia paling banyak akan menjadi yang paling berkuasa. Kebijakan proteksionisme digunakan untuk memastikan bahwa neraca perdagangan memiliki lebih banyak ekspor impor. Misalnya, negara melindungi industri dalam negeri dengan mensubsidi barang ekspor, melarang ekspor barang seperti logam mulia ke negara lain untuk menjaga kekayaan logam mulia di dalam negeri, dan melarang impor barang yang dapat diproduksi dalam negeri melalui kebijakan seperti tarif bea masuk (Hokianto et al., 2023). Dimana merkantilis melihat jika

sebuah negara ingin tetap surplus mereka dilarang untuk mengimpor barang yang bisa diproduksi dalam negeri. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena semangat KSST dalam hal ini menjunjung tinggi kerjasama dan rasa empati, Indonesia dapat mengepakkan sayap dengan lebar tapi harus tetap pada prinsip untuk solidaritas pembangunan di wilayah Selatan.

Dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, dan politik kolonial, paradigma manufaktur menunjukkan neraca perdagangan internasional yang menguntungkan. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis melindungi industri dalam negeri tetapi membatasi perdagangan internasional secara terkontrol. Ini disebabkan oleh pembagian kerja yang muncul dalam masyarakat, termasuk pembagian kerja teknis dan teritorial, yang mendorong perdagangan internasional. Proteksi industri dan tingkat upah yang rendah meningkatkan ekspor. Dalam aliran merkantilisme, ada tiga pokok pemikiran: neraca perdagangan, mekanisme arus logam mulia, proteksi, dan teori kuantitas uang. Semua pokok ini berfokus pada satu doktrin merkantilisme, yaitu neraca perdagangan yang menguntungkan (Ainun et al., 2024). Hal ini juga sejalan dengan teori *Developmental Country*. Dimana negara masih menjadi aktor utama dalam sebuah tatanan ekonomi.

3. Kontribusi Sektor Manufaktur Indonesia pada Kerjasama Selatan-Selatan.

Sebagai negara yang sudah menjadi *middle income country*, sudah seharusnya Indonesia mengekskalasi pengaruhnya di kancah dunia lebih khususnya di negara negara Selatan. Menurut data yang ada, industri manufaktur sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Saat ini, industri manufaktur berkontribusi pada perekonomian berskala nasional sebanyak 20,27% di ASEAN, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan bisnis manufaktur di Indonesia, yang memungkinkannya beralih dari berbasis barang menjadi berbasis manufaktur. Selanjutnya, jelas bahwa sektor manufaktur memiliki potensi yang sangat besar untuk menambah tenaga kerja, meningkatkan nilai bahan baku, dan meningkatkan sumber devisa (Azwina, Wardani, Sitanggang, & Silalahi, 2023). Yang menjadi masalah adalah minimnya data ekspor dan juga publikasi yang dilakukan untuk mengekspos kontribusi manufaktur Indonesia. Padahal hal ini menjadi cukup krusial karena ketika ada data yang konkret tentang perusahaan manufaktur yang berkontribusi pada Kerjasama Selatan-Selatan yang

didapatkan tidak hanya pendapatan tapi juga status quo Indonesia sebagai negara yang sudah mulai maju.

Salah satu bentuk Kerjasama yang ada adalah PT INKA (Industri Kereta Api). PT Industri Kereta Api (Persero), atau PT INKA (Persero), adalah salah satu BUMN pertama yang beroperasi di sektor manufaktur kereta api terintegrasi di Asia Tenggara. Menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi untuk setiap pelanggan adalah tujuan PT INKA. PT INKA menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, INKA memastikan setiap pelanggan mendapatkan barang kualitas terbaik. Berbagai prestasi ekspor sudah tercatat oleh PT INKA, salah satunya adalah sejumlah ekspor ke Bangladesh, meskipun kereta api bukanlah komoditas ekspor utama Indonesia. Ekspor tersebut mencakup total 250 kereta dengan rincian 200 kereta tipe MG (Meter Gauge) dan 50 kereta tipe BG (Broad Gauge) dengan total nilai kontrak sebesar US\$ 100,89 juta dan telah selesai dikirim pada September 2020. Tren ekspor PT INKA kepada Bangladesh Railway tersebut bukan kali pertama melainkan meneruskan keberhasilan ekspor 150 unit gerbong dengan nilai kontrak sebesar US\$ 72,39 juta pada tahun 2016, dan ekspor 50 unit sebelumnya pada tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 13,8 juta (Latief et al., 2022). Dari sini sudah terlihat bahwa kontribusi manufaktur pada Kerjasama Selatan Selatan hanya sebatas impor ekspor dan ini sangat disayangkan karena dari berbagai data yang ada industri manufaktur menjadi *leading sector* pada Indonesia, data dari Kemendag (2024) menunjukkan bahwa industri berkontribusi sebesar 71.11% terhadap total ekspor Indonesia berdasarkan industri pada tahun 2024, sementara sektor pertanian, migas, dan pertambangan hanya berkontribusi sebesar 1.70%, 6.15%, dan 19.90% (Hotsawadi & Gea, 2025). Contoh lain adalah PT. Sinar Antjol yang berhasil melakukan investasi ke negara Ethiopia sebesar 4 juta dollar dan menguasai sekitar 35% pasar Ethiopia (hadi & Darmastuti, 2010). Melalui ekspansinya ke negara-negara Afrika yang merupakan mitra SSTC (South-South Triangular Cooperation) Indonesia, PT. Indofood membantu mewujudkan peran aktif Indonesia dalam SSTC (South-South Triangular Cooperation) atau KSST (Kerjasama Selatan-Selatan Triangular). PT. Indofood mulai berekspansi ke negara-negara Afrika dengan produknya, termasuk mie instan indomie. Negara-negara seperti Mesir, Nigeria, Sudan, dan Afrika Selatan menyambut baik kehadiran indomie karena dapat membantu mereka dalam hal ketahanan pangan dan keamanan pangan. Kesuksesan PT. Indofood juga didukung oleh kondisi

negara-negara Afrika yang memiliki kekurangan dalam bidang pertanian dan bahan pangan, serta tingginya biaya bahan makanan. PT. Indofood adalah salah satu tindakan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara mitra SSTC, terutama negara-negara Afrika yang memiliki masalah ketahanan pangan dan keamanan pangan yang rumit seperti Nigeria, Mozambik, dan Sudan. Tiga negara ini adalah yang paling cepat berkembang dibandingkan negara-negara Afrika lainnya. Setelah itu, PT. Indofood disambut dengan baik di sana. Indofood membuat indomie yang murah untuk keluarga besar (Pramestia Sekar Salsabilla, 2021). Ditambah lagi Indonesia beberapa kali menjadi salah satu negara providers dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Menurut data world bank Indonesia berada di peringkat 10 sebagai negara yang memberikan transfer ilmu kepada negara lain, dan hal ini menjadi terobosan yang cukup menjanjikan karena Indonesia yang sedang gencar gencar untuk mengepakkan sayapnya di dunia (Janus et al., 2018) Bentuk kerjasama bisa terjalin dengan banyak cara salah satunya dengan perdagangan, dalam hal ini industri manufaktur, Indonesia tidak hanya merasakan investasi yang dilakukan negara luar menuju Indonesia tapi juga sebagai negara pemberi investasi ke negara lain dan ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam berkiprah di kancah Internasional.

Terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah, sektor manufaktur Indonesia terus berkembang. Sebagai contoh, industri manufaktur nasional menghadapi tekanan pada daya saing (produktivitas) karena beberapa perubahan penting, seperti desentralisasi dan kebijakan tenaga kerja (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia). Di sisi lain, industri manufaktur Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah di pasar global, termasuk persaingan produk yang semakin meningkat dengan negara lain, masalah infrastruktur dan sumber daya alam yang relatif renovasi, dan kurangnya sumber daya manusia. menyatakan bahwa faktor utama penyebab defisit perdagangan pasa dalam industri manufaktur Indonesia adalah ketergantungan industri manufaktur dalam negeri terhadap impor bahan baku dan barang modal, yang membuat Indonesia kurang berdaya saing di pasar global. Produk manufaktur Indonesia masih kurang berkualitas dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand, terutama dari segi kualitas dan efisiensi produksi (Hotsawadi & Gea, 2025). Dilihat dari penjelasan diatas dan dengan teori *developmental country*. Indonesia menjadi aktor utama. Indonesia harus mampu mendukung industri utama seperti manufaktur untuk menjadi pilar pembangunan nasional dan alat diplomasi ekonomi. Namun, keadaan sebenarnya

menunjukkan bahwa peran strategis ini belum sepenuhnya tercermin dalam partisipasi sektor manufaktur Indonesia dalam skema KSST. Sebagian besar kontribusi manufaktur masih bersifat reaktif dan tidak teratur, bukan merupakan hasil perencanaan yang matang untuk diplomasi ekonomi. Banyak perusahaan swasta seperti PT Sinar Antjol dan perusahaan milik negara seperti PT INKA telah menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia dapat berhasil memasuki pasar Selatan. Namun, alih-alih menjadi komponen skema kebijakan industri luar negeri yang direncanakan secara nasional, inisiatif-inisiatif ini terutama berasal dari sektor korporasi itu sendiri. Indonesia dalam hal ini masih menjadikan sektor swasta dan industri hanya sebagai moda untuk menambah kekayaan negara, sama seperti pemikiran *merkantilis*. Padahal jika Indonesia berhasil memanfaatkan keunggulan komparatif seperti dalam kasus PT Indofood yang menjadi salah satu *leading sector* di negara afrika yang sangat kesusahan dalam bidang pertanian dan hal ini menjadi sebuah keuntungan yang cukup signifikan.

4. Potensi Unggulan Sektor Manufaktur Indonesia untuk SSTC

Industri manufaktur sangat penting untuk pembangunan ekonomi karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2000 hingga 2019, industri ini mengalami pertumbuhan rata-rata 12,67 persen. Sektor pengolahan nonmigas menyumbang 72,24% dari nilai ekspor nasional pada tahun 2023; kemudian naik menjadi 74,25% pada tahun 2024, ketika nilai ekspor nasional mencapai US\$264,70 miliar. Selain itu, pada tahun 2023, sektor ini berkontribusi sebesar 39,84% dari total nilai investasi nasional. Sektor ini juga meningkat pada tahun 2024, dengan kontribusi 42,1% atau Rp721,3 triliun, menjadikan sektor dengan sumbangsih investasi tertinggi. Sektor ini cukup menarik investor karena peran besarnya dalam perekonomian. Karena biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, Indonesia dianggap memiliki "daya tarik" (Ayuningtyas, 2025). Dari pemaparan diatas potensi yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi karena dunia pada saat ini sedang gencar gencarnya mengembangkan teknologi. Berdasarkan data dari Pusdatin Kemenperin, ekspor TPT pada tahun 2018 menyumbang sekitar 13,53% dari total ekspor industri pengolahan nonmigas Indonesia. Ini juga menempati posisi ke-4 sebagai produk ekspor terbesar di Indonesia, di belakang produk makanan, logam dasar, bahan kimia, dan barang dari bahan kimia (Eva Mayasari, Budiono, & Ervani, 2021). Dengan adanya keunggulan komparatif

pada tekstil Indonesia dapat bermitra dengan negara-negara Selatan dalam rangka peningkatan mutu/produk. Hal ini diperkuat dengan data ekspor kota Pekalongan komoditi (TPT) menyumbang sekitar Rp 83,694 M dengan volume sebanyak 748.261 kg. komponen ini terdiri dari barang-barang tekstil kota batik itu sendiri (Dwi Nur Maulidia et al., 2023). Jika kita berfokus kepada sektor TPT, Indonesia sangat memiliki keunggulan komparatif berupa bahan baku dan biaya tenaga kerja yang kompetitif, selain itu dari segi historis batik Indonesia memiliki *legacy* tersendiri di kancah internasional, ditambah lagi Saat ini, industri TPT berada di urutan ketiga dalam hal ekspor nasional, mempekerjakan 2,79 juta orang, dan mampu memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri. Dan ini membuka sekali kerjasama antar negara-negara selatan dengan Indonesia selain memberikan informasi dan juga pelatihan kepada negara lain, tapi juga Indonesia dapat belajar tentang bagaimana mengolah tekstil yang ramah lingkungan dengan negara maju, lalu diterapkan tidak hanya di Indonesia tapi juga negara yang lain. Hal ini akan membuat sebuah rantai yang nantinya status Indonesia tidak hanya menjadi negara penerima tapi sebagai negara penyedia. Selain itu, daerah-daerah di Indonesia seperti Pekalongan, Solo, dan Bandung merupakan kota-kota sentra tekstil dan batik di Indonesia, yang nantinya menjadi *role model* Indonesia ketika ingin membawa hal ini ke pihak-pihak luar. Dengan banyaknya keragaman batik yang ada di Indonesia ini bisa menjadi potensi yang cukup menjanjikan untuk Indonesia, hal ini baru satu kota saja, berapa banyak yang bisa Indonesia dapatkan jika Indonesia dapat memaksimalkan potensi yang ada dan ditambah dengan kerja sama yang dilakukan dengan negara-negara lain. Sudah pasti Indonesia akan mengalami fluktuasi yang massif pada bidang apapun.

Salah satu potensi yang cukup menjanjikan datang dari bidang otomotif, karena adanya perbedaan teknologi yang cukup jauh antara negara utara dan selatan membuat Indonesia bertransformasi sebagai penyedia teknologi untuk negara selatan lain, AIMMDes (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan) disiapkan untuk pasar internasional dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu mencapai 10 ribu mobil. Dangote Group, perusahaan logistik dan barang-barang consumer terbesar di Nigeria tertarik untuk membeli unit tersebut (Pebrianto, 2020).

Di era global saat industri di seluruh dunia bergabung untuk membentuk mata rantai pasar global, situasi ini harus dianggap baik sebagai peluang maupun ancaman. Pelaku industri memiliki peluang untuk masuk ke pasar global, sedangkan ancaman

terjadi jika pelaku industri nasional tidak dapat bertahan di pasar domestik. Produk industri nasional harus memiliki ciri khas Indonesia, seperti harga terjangkau, produksi cepat dalam jumlah besar, kualitas terbaik, dan berorientasi pelanggan. Sudah saatnya industri nasional berkonsentrasi pada nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan, dengan fokus pada aplikasinya di bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Tujuan jangka pendek adalah meningkatkan posisi Indonesia dari urutan ke-41 di dunia dari 138 negara yang tercantum dalam Laporan Daya Saing Global 2016-2017 Pemerintah harus mendorong bisnis untuk menerapkan industri 4.0. Dengan masuknya industri 4.0, model bisnis menjadi lebih efektif dan inovatif. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di sektor industri merupakan salah satu kemajuan yang dihasilkan oleh revolusi industri ini; ini memungkinkan sistem persetujuan dokumen online untuk menghemat waktu dan biaya (JESHIKA, 2019).

Ditambah lagi dengan adanya *Artificial Intelligence*, AI memberikan terobosan dan kemudahan terhadap operasional perusahaan yang bisa lebih efisien. Contohnya dalam memelihara mesin pabrik dan memprediksi berapa bahan baku yang dibutuhkan. Dengan memanfaatkan data yang sudah ada tentang permintaan pelanggan dan tren pasar, kebutuhan bahan baku di masa yang akan datang akan bisa diprediksi, dan hal ini mengurangi kemungkinan perusahaan untuk merencanakan produksi dan menghindari pembelian yang berlebihan untuk bahan baku, karena hal tersebut dapat mengganggu proses produksi. Selain itu, efisiensi operasional meningkat secara signifikan ketika sistem pemeliharaan mesin menggunakan teknologi AI. Perusahaan dapat melakukan perawatan preventif yang lebih efektif dengan memanfaatkan analisis prediktif dan pemantauan kondisi mesin secara realtime. Perusahaan dapat mengurangi downtime yang tidak terduga dan biaya pemeliharaan yang tinggi dengan mengidentifikasi kegagalan mesin yang mungkin dan merekomendasikan solusi untuk masalah tersebut (Novita et al., 2024).

5. Tantangan dan Strategi Penguatan Kontribusi Indonesia

Menurut teori *developmental state*. Negara membangun negaranya dengan berbagai cara dan dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kecenderungan menjadikan negara sebagai aktor yang cukup krusial dalam membuat kebijakan tentang perdagangan luar negeri maupun pemberian investasi, dan hal ini

sejalan dengan SSTC yang memang mengedepankan kerjasama antar negara di dunia (Permata Sari & Ibrahim, 2023). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah saat pemberian bantuan keluar negeri adalah kurangnya kejelasan tentang tujuan dan motivasi Indonesia terkait dengan tujuan sebenarnya dari pelaksanaan program bantuan. Indonesia masih dalam proses menjadi negara pemberi bantuan daripada negara penerima bantuan. Oleh karena itu, belum ada pendekatan strategis untuk merencanakan dan menerapkan program bantuan luar negeri (Andi Sintia, 2024). Dengan ini jelas bahwa Indonesia masih tertatih dalam hal ini dan jika menilik dari kecenderungan negara berkembang yang menjadi pemberi kebijakan dalam hal ini bantuan maupun partisipasi manufaktur Indonesia dikendalikan langsung oleh Tim Koordinasi Nasional KSST, yang berisi BAPPENAS, KEMLU, KEMENKEU, KEMSETNEG, yang bertanggung jawab untuk program-program yang dilakukan (Andi Sintia, 2024). Karena hal tersebut peran pemerintah dalam membuat kebijakan agar industri manufaktur dapat ikutserta dan juga berperan aktif dalam mewujudkan Kerjasama Selatan-Selatan. Namun, ada sejumlah masalah yang terkait dengan peran sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Daya saing global yang rendah adalah masalah utama. Banyak industri di Indonesia, terutama industri manufaktur, masih bergantung pada bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan mereka, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan bahan baku. Selain itu, banyak industri masih menghadapi kendala dalam hal efisiensi produksi, kualitas produk, dan kemampuan inovasi (Prabowo & Hasibuan, 2025). Karena adanya ketergantungan tersebut sudah sepatutnya pemerintah bisa lebih mengerti dan memberikan kebijakan untuk permasalahan tersebut. Lagi lagi potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang manufaktur sangat sangat besar dan apabila tidak di manfaatkan hanya akan menjadi angan angan belaka.

Berbagai kerjasama sudah digalakkan oleh pemerintah Indonesia seperti pada tahun 2018 Indonesia dan Australia menjalin Kerjasama dalam bidang manufaktur dengan perjanjian yang bernama IA-CEPA (*Indonesia-Australia Economic Partnership Agreement*), perjanjian ini diharapkan dapat membantu kedua negara melalui penyediaan barang manufaktur dengan biaya yang lebih rendah dan akses yang lebih mudah bagi produsen Indonesia. Dalam hal ini, IA-CEPA berhasil membuat Indonesia menghapus tarif pada 6,2 persen dari pos tarif untuk barang manufaktur dan barang lain. Pada saat yang sama, Indonesia akan membebaskan bea masuk impor dari Australia untuk produk

yang diatur dalam IA-CEPA, seperti besi, plastik, katoda tembaga, mesin, elektronik, dan tekstil. Bisnis Australia akan memiliki akses yang lebih murah ke industri manufaktur seperti pakaian dan bahan setelah impor Indonesia dibebaskan (Nuranisa & Paksi, 2022). Kebijakan pemerintah seringkali menjadi penghalang yang besar; dalam beberapa kasus, pemerintah secara penuh akan menghalangi masuknya pendatang baru. Ini terjadi di banyak industri, terutama di sektor pendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas, yang masing-masing dirancang sebagai industri nasional oleh pemerintah masing-masing (Nur Hidayatillah & Muhammad Yasin, 2023). Tapi tidak sepenuhnya kebijakan pemerintah itu harus membuka ekonomi negara, karena industri dalam negeri patut di lindungi karena jika hanya memikirkan pembukaan pasar, itu bukanlah sebuah solusi, jadi industri manufaktur sendiri harus mampu membuat terobosan, agar nantinya ketika pemerintah membuat kebijakan yang memungkinkan manufaktur untuk ikut terlibat aktif dalam KSST, maka manufaktur harus siap akan hal tersebut.

Jika dilihat dari sudut pandang merkantilis, kekuatan negara di topang dari kekayaan negara itu sendiri, kerjasama internasional dipandang hanya sebagai sarana memperkaya negara sendiri. Indonesia selama ini menjadikan industri manufaktur hanya sebagai moda ekonomi pembangun pendapatan per kapita negara. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang benar, tapi rasa rasanya ini berkebalikan dengan semangat SSTC itu sendiri, dimana Indonesia sekarang ini sudah bisa menjadi negara yang bisa memberikan bantuan kepada negara lain, meski tidak sebanyak negara lain. Komitmen tersebut seharusnya menjadi dorongan Indonesia untuk melibatkan sektor manufaktur, karena potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang manufaktur sangatlah menjanjikan, disamping itu merkantilis linier dengan teori developmental country, dimana negara menjadi aktor utama dalam sebuah kebijakan dan jika Indonesia memaksimalkan hal tersebut, Indonesia tidak akan hanya mendapat keuntungan saja, tapi mendapatkan mitra dari beberapa negara seperti Mozambik, dimana jumlah ekspor Indonesia ke Mozambik menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemasok ekspor non-migas utama negara tersebut. Dengan neraca perdagangannya, Mozambik seharusnya menjadi mitra dagang yang menguntungkan bagi Indonesia. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan menghasilkan neraca perdagangan yang berlebihan. Minyak kelapa sawit, sabun, margarin, dan kertas adalah beberapa komoditi utama yang diekspor dari Indonesia ke Mozambik (Larasati & Aseilla, 2021).

Untuk mengukur bagaimana Indonesia memanfaatkan keunggulan yang ada dengan memanfaatkan SSTC tanpa melawan moral dari SSTC yang berbasis kerjasama, perlu adanya komparatif dari negara lain, Brazil contohnya untuk mengimbangi kekurangan kekuatan militer dan ekonominya, Brasil menggunakan pendekatan diplomatik berlapis-lapis. Di tingkat global, presiden Brasil berusaha memperkuat standar dan organisasi internasional untuk menyeimbangkan kekuatan hegemoni di seluruh dunia. Sementara itu, mereka juga bekerja sama dengan negara lain secara bilateral dan multilateral untuk meningkatkan kekuatan diplomatik dan ekonomi mereka. Brands menyatakan secara ideologis bahwa Lula menggunakan strategi seperti multilateralisme dan pembangunan koalisi, yang biasanya digunakan oleh "kekuatan menengah", untuk mencapai pengaruh sistemik. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat transisi ke multipolaritas—yang akan lebih menguntungkan Brasil—dari unipolaritas. Tangan baru ini menyimpang dari struktur internasional pasca-Perang Dingin, yang merugikan negara berkembang (Sasongkojati & Subono, 2023). Dari penjelasan yang ada secara garis besar Brazil menggunakan basis liberalisme, dimana brazil memupuk kerjasama dengan banyak pihak sebagai kekuatan untuk menjadikan Brazil maju dan menjadi sebuah negara adidaya. Sama seperti Indonesia namun kenyataanya saat ini Indonesia belum bisa memaksimalkan sumber daya yang ada dan ini sangat disayangkan karena geografis brazil hampir sama dengan Indonesia, dan Indonesia memiliki kesempatan yang sama, terlebih lagi dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak membelenggu Indonesia untuk berkerjasama dengan siapapun.

Selain itu, pemerintah berkonsentrasi pada pembiayaan proyek infrastruktur dan kerja sama dalam pembuatan kebijakan dan pengetahuan teknis antara entitas publik, swasta, dan lembaga lainnya. Perjanjian pembangunan dan badan multilateral muncul sebagai hasil dari permintaan Lula agar negara-negara berkembang lebih terlibat dalam negosiasi internasional. Untuk memberikan hak istimewa dalam perdagangan dan pendidikan, perjanjian 2003–2009 ditandatangani antara Brasil dan Mercosur serta negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan, Aljazair, dan Mesir. Dalam hal strategi, Brasil berpikir untuk "memanfaatkan" kesenjangan yang diciptakan oleh asimetri hierarki kekuatan internasional. Brasil ingin menggunakan kekuatan lunak untuk memastikan keamanan dan kemajuan negaranya. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan dalam dokumen Kebijakan Pertahanan Nasional (PND) negara tersebut tahun 2005, tujuan

utamanya adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai, menghormati kedaulatan negara lain, dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain (Sasongkojati & Subono, 2023). Brazil menggunakan soft power, mereka tidak menggunakan militer sebagai kekuatan negaranya. Brazil melihat adanya ketimpangan (*asymmetry*) dalam sistem global. Brazil berfikir daripada bersaing secara militer atau ekonomi dengan negara maju, Brazil memposisikan diri sebagai pemimpin negara berkembang, tercermin dari Mercosur dan kerja sama dengan Afrika. Kontras dengan komitmen Indonesia yang lebih *defensive* dan pragmatis, jadi KSST bukan sebagai strategi utama dalam politik luar negeri. Brazil juga melibatkan sektor swasta dalam proyek besar Kerjasama luar negerinya, kontras dengan Indonesia yang kurang melibatkan industri manufaktur.

Prinsip otonomi dan non-intervensi telah lama menjadi dasar kebijakan luar negeri Brasil. Prinsip solidaritas ditambahkan oleh Celso Amorim, menteri luar negeri Lula. Dengan kata lain, Brasil harus membantu negara-negara Selatan yang miskin dengan mengajarkan mereka cara menerapkan kebijakan yang telah membantu Brasil menjadikan negara tersebut tidak terlalu miskin dan tidak terlalu timpang. Brasil tidak akan menyumbangkan uang, menetapkan prioritas, atau terlibat dalam politik negara. Di sisi lain, negara-negara Selatan dapat mempertimbangkan portofolio kebijakan federal Brasil yang luas sebagai bagian dari proyek yang didanai oleh ABC dan diawasi oleh anggota lembaga federal (Morais de Sá e Silva, 2021). Disini brazil membuat kerjasama antar negara bukan dari segi finansial tapi lebih pengalaman teknis dan proyek mereka yang sukses, perbedaan dengan Indonesia didalam hal aid masih terbatas pelatihan teknis dan belum sepenuhnya Menyusun “kebijakan unggulan Indonesia” untuk ditranfer ke negara lain sebagai model.

6. Conclusion

Meskipun industri manufaktur Indonesia telah menunjukkan kapasitas dan performa ekonomi yang kuat, kontribusinya dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) masih belum dikelola sebagai strategi nasional yang terstruktur. Padahal, secara empiris, keterlibatan perusahaan seperti PT INKA, PT Sinar Antjol, dan Indofood sudah membuktikan bahwa manufaktur Indonesia mampu bertindak sebagai agen pembangunan lintas batas, bukan sekadar pelaku perdagangan.

Ketidakhadiran kebijakan yang mengintegrasikan industri manufaktur dalam diplomasi pembangunan menunjukkan bahwa negara masih memandang sektor ini lebih sebagai mesin ekspor ketimbang instrumen diplomasi ekonomi. Pola ini memperlihatkan kecenderungan merkantilis dalam pengelolaan kerja sama luar negeri, yang dalam konteks SSTC justru berpotensi bertentangan dengan semangat solidaritas dan pembangunan kolektif antar negara Selatan.

Temuan ini memperkuat teori *developmental state*, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pembangunan, Indonesia diharapkan kedepannya bisa menjadi negara *provider* pembangunan. Dengan menata ulang kebijakan sehingga industri manufaktur dapat berdampak pada diplomasi ekonomi, serta merancang kebijakan industri yang berbasis solidaritas, dimana Indonesia tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi juga mendapatkan legitimasi dan posisi strategis dalam tatanan global.

V

References

- Abdurachman, B., & Mi'raz Prakoso, B. (2017). Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. *JURNAL TRANSBORDERS*, 1(1).
- Ainun, R., Uin, N., Wahid, K. H. A., Dwi, P., Septiyani, A., Wahid, U. K. H. A., ... Pekalongan, K. (2024). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI MERKANTILIS DAN EKONOMI KLASIK ADAM SMITH. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 361–367. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.608>
- Akio Hosono, A. T. (2012). *Scaling Up South-South and Triangular Cooperation*. Tokyo: JICA Research Institute.
- Andi Sintia. (2024). Tantangan Pemberian Bantuan Luar Negeri Indonesia ke Pasifik Berdasarkan Model Birokrasi Politik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 335–344. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.887>
- ANDRZEJ BOLESTA. (2007). CHINA AS A DEVELOPMENTAL STATE. *MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS NO 5*, 106–106.
- Apresian, S. R. (2017). Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2), 189–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v12i2.2653.189-203>

- Ayuningtyas, A. D. (2025, March 6). *Industri Manufaktur Sumbang 18,98% terhadap PDB Indonesia*. Retrieved from GoodStats: <https://goodstats.id/article/industri-manufaktur-sumbang-18-98-terhadap-pdb-indonesia-tSkW8>
- Azwina, R., Wardani, P., Sitanggang, F., & Silalahi, P. R. (2023). STRATEGI INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. In *Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 2). Jurnal Manajemen.
- Bella Fasta'sima, Hafizhah Hasna Zaharani, Wildan Ubaydilah Widodo, & Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2024). Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Manufaktur. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 50–60. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1095>
- Dwi Nur Maulidia, Mohammad Ricko Kurniawan, & Muhammad Yasin. (2023). Analisis Struktur Industri Unggulan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Kota Pekalongan Jawa Tengah. *Student Research Journal*, 1(3), 310–324. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.341>
- Eva Mayasari, S., Budiono, & Ervani, E. (2021). *ANALISIS PENGARUH ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TERHADAP KINERJA EKSPOR INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) INDONESIA*.
- Hadi, Syamsul, & Darmastuti, S. (2010). *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS SECRETARIAT JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY*.
- Hokianto, H. F., Velissia, L., Fernando, K., Tiono, L., Herawan, K., & Jaya, W. (2023). Jatuhnya Emas Sebagai Standar Kemakmuran Suatu Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 16–22. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.4>
- Hotsawadi, & Gea, I. V. (2025). Menembus Pasar Global: Performa dan Dampak Keterbukaan Perdagangan Terhadap Ekspor Manufaktur Indonesia (Penetrating the Global Market: Performance and Impact of Trade Openness on Indonesian Manufacturing Exports). *JURNAL EKONOMI SAKTI*, 14(1), 106–127.
- Hutabarat, L. F., & Damayanti, A. (2023). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 428. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.3>

- Janus, S., Uzele, T., Brahmam, M., Aziz, N., Burkhalter, P., Qamruddin, J., ... Hirunwatsiri, W. (2018). *The South-South Experience Exchange Facility Implementation Progress Report 2017*. Retrieved from www.worldbank.org
- JESHIKA. (2019). PERKEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL MENUJU INDUSTRI TANGGUH, 2035. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 1766–1775.
- JICA. (2010). *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS SECRETARIAT JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY*. Tokyo.
- Larasati, L., & Aseilla, D. (2021). Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia di Afrika Melalui Preferential Trade Agreement Indonesia Mozambik. *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 49–57. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i2.4625>
- Latief, M., Rimapradesi, Y., & Riswandha Jhuswanto, F. (2022). Commercial Diplomacy of PT INKA (PERSERO) Indonesia in the Export of Goods Carriage for KiwiRail New Zealand in 2021. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.3>
- Morais de Sá e Silva, M. (2021). South–South cooperation resilience in Brazil: presidential leadership, institutions and bureaucracies. *Third World Quarterly*, 42(10), 2353–2371. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1951199>
- Novita, Y., Zahra, R., Studi Manajemen, P., STIE YPHB Aceh, P., Banda Aceh, K., Aceh, P., ... Indonesia Banda Aceh Kota, S. (2024). Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional di Perusahaan Manufaktur: Studi Kasus PT. XYZ. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi (JMT)*, 1(1). <https://doi.org/10.35870/jmt.vxix.773>
- Nugroho, Y. D., & Wahyuni, K. T. (2019). *AGLOMERASI DAN DINAMIKA INDUSTRI MANUFAKTUR PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KORIDOR EKONOMI JAWA*.
- Nur Hidayatillah, & Muhammad Yasin. (2023). Strategi Persaingan Industri Dan Peran Kekuatan Pasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 12–22. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.678>
- Nuranisa, S. A., & Paksi, A. K. (2022). Peran Strategis Kerjasama IA-CEPA Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal*

- Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 192–202.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47310>
- Pebrianto, F. (2020, January 6). *Indonesia Akan Ekspor 10 Ribu Mobil Pedesaan ke Nigeria*. Retrieved from TEMPO: <https://www.tempo.co/ekonomi/indonesia-akan-ekspor-10-ribu-mobil-pedesaan-ke-nigeria-667515>
- Permata Sari, C. D., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464–2473.
<https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>
- Prabowo, R., & Hasibuan, A. (2025). KONTRIBUSI INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. *VARIABLE RESEARCH JOURNAL Volume 02, Number 01*.
- Pramestia Sekar Salsabilla, F. W. (2021). SSTC-RI dan Perusahaan Indonesia Implementasi SSTC (South-South Triangular Cooperation) RI oleh PT.Indofood Sukses Makmur dengan Produk Indomie. *PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS BISNIS PSIKOLOGI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA* (pp. 1-17). Yogyakarta: studocu.
- Sasongkojati, R. M. H. D. R., & Subono, N. I. (2023). Strategic Culture, South-South Cooperation, and Soft Power Politics: Explaining Brazilian Foreign Aid. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(2), 176–191.
<https://doi.org/10.22146/jsp.81267>
- Suryani, & Yusrizal. (2023). *Peran sektor industri manufaktur dalam mendukung gerakan green economy*.
- Syukri, M. (2024). Indonesia's New Developmental State: Interrogating Participatory Village Governance. *Journal of Contemporary Asia*, 54(1), 2–23.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904>